

Bupati Ganti Direktur Politeknik

Inspektorat Periksa Masalah Keuangan

KETAPANG, TRIBUN - Bupati Ketapang, Henrikus, menegaskan, pekan ini akan segera melakukan rapat internal terkait penggantian Direktur Politeknik Ketapang, Nurmala. Sekaligus rencana pengantian kepengurusan Yayasan Pangeran Hiranata sebagai pengelola politeknik.

"Rapat internal segera akan kami lakukan. Kami akan menyiapkan personil yayasan dan direktur politeknik yang baru. Menganti personil yayasan dan direktur yang sudah habis masa kontraknya," ujar Henrikus di ruang kerjanya, Senin (7/2) siang.

Dia mengakui telah mengantongi sejumlah nama kandidat pengganti direktur politeknik, dan juga nama pengganti personil yayasan. Nama-nama itu akan ia bawa dalam rapat pekan ini.

Namun, dia masih masih merahasiakan nama para pengganti yang akan ditunjuk. Henrikus hanya sedikit membuka informasi secara normatif, yakni para kandidat di antaranya para pejabat yang memiliki jiwa di dunia pendidikan dan



TRIBUN/DOK

”Direktur seharusnya tidak mengurus keuangan dan tidak mengurus pembangunan. Direktur dan dosen tugasnya fokus mengajar.”

HENRIKUS
Bupati Ketapang

mau membangun Ketapang lebih serius.

"Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memperbaiki yayasan dan manajemen kampus yang saat ini *error*. Terkait permasalahan keuangan kampus, pemerintah mendorong inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap opini yang telah terbentuk," tegas Henrikus.

Dia berharap ke depan, direktur dan pengurusan yayasan yang ditunjuk nanti, bisa menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Menurutnya, "kekacauan" di Politeknik Ketapang saat ini dipicu ketidakseriusan semua pihak, misalnya tumpang tindih tugas dan tanggungjawab.

"Direktur seharusnya tidak mengurus keuangan dan tidak mengurus pembangunan. Di-

rektur dan dosen tugasnya fokus mengajar. Sedangkan yayasan mengatur seluruh keuangan dan pembangunan," tegas Henrikus.

Bagaimana dengan permasalahan gaji dosen dan pegawai yang belum dibayar pihak manajemen?

Bupati menegaskan, gaji tersebut merupakan hak para dosen dan pegawai yang tidak bisa diabaikan.

"Sisa gaji para dosen yang belum dibayar itu hak mereka dan harus dibayarkan. Walau begitu kita tidak boleh terburu-buru melakukan pembayaran sebelum dilakukan pemeriksaan," ujarnya.

Selain itu, dia menegaskan, Pemkab hanya akan memberikan hibah sebanyak satu kali. Tak akan lebih, bisa saja menjadi temuan BPK. (pio)